

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. SEKRETARIAT DAERAH

VISI	: Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
MISI	: Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh rencana aksi X 100% Penjelasan : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) ada 4 area perubahan meliputi Sumber Daya Aparatur, Penataan Peraturan Perundangan, Pengawasan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 13 Program.	Bagian Organisasi	Hasil Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kualitas Organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan SOP	Jumlah SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah diterapkan dibagi jumlah keseluruhan SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan X 100% Penjelasan : Kriteria diterapkan adalah telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik unit kerja maupun pelaksana serta telah dilakukan evaluasi minimal satu kali dalam setahun oleh 102 unit kerja/SKPD	Bagian Organisasi	Hasil Monev penyelenggaraan pelayanan publik

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	a. Cakupan modin, guru ngaji, dan guru sekolah minggu penerima tunjangan	Jumlah modin, guru ngaji, dan guru sekolah minggu penerima tunjangan dibagi jumlah seluruh modin yang terdaftar X 100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Daftar penerima tunjangan
	b. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan	Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan dibagi jumlah keseluruhan tempat ibadah X 100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Daftar tempat ibadah penerima bantuan perbaikan
Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah	a. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	Jumlah Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dibagi jumlah keseluruhan Peraturan Daerah yang tercantum dalam program legislasi daerah X 100%	Bagian Hukum	Program Legislasi Daerah
	b. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang telah dipublikasikan pada masyarakat dan aparatur pemerintah dibagi jumlah seluruh peraturan perundang-undangan daerah X 100%	Bagian Hukum	Hasil kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan daerah